



Pendampingan Strategis Penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang Terpadu dengan RPJMD Merauke 2025–2029.

Indra Kertati^{1*}, Fadhli Rizal Makarim², Karningsih³

^{1,3} Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

² Universitas Sultan Agung Semarang, Indonesia

indra-kertati@untagsmg.ac.id^{1*}, rizalmakarim@unissula.ac.id², karningsih@untagsmg.ac.id³

Alamat: Jl. Pemuda No.70, Pandansari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: indra-kertati@untagsmg.ac.id

Article History:

Received: April 30, 2025;

Revised: Mei 03, 2025;

Accepted: Mei 17, 2025;

Online Available: Mei 19, 2025;

Keywords: Local Government Agencies, Participatory Action Research, RPJMD, Strategic Plan, Strategic Planning

Abstract: *The formulation of Strategic Plans (Renstra) aligned with the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) is a crucial component in regional development planning systems. However, many local government agencies face institutional and technical challenges in producing high-quality, integrated Renstra documents. This community engagement program aimed to assist local government agencies in Merauke Regency in developing Renstra documents aligned with the 2025–2029 RPJMD using a Participatory Action Research (PAR) approach. The activity was conducted in four groups representing basic service, administrative, technical, and regional management functions. The PAR method was applied to foster active involvement of government staff in identifying strategic issues, setting goals and targets, formulating performance indicators, and determining priority programs. The results showed that the participatory approach effectively improved technical understanding and promoted awareness of result-based planning. Despite challenges such as limited human resources and sectoral data, most agencies successfully developed more structured and responsive Renstra documents. The process also promoted a collaborative dialogue culture between academia and bureaucracy. This program concludes that PAR can serve as an effective model for improving the quality of strategic planning documents and strengthening institutional capacity in regional governments. Recommendations include the need for sustainable capacity-building programs, the formation of internal facilitator teams, and stronger integration between planning and budgeting systems.*

Abstrak

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan elemen krusial dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Namun dalam praktiknya, banyak perangkat daerah menghadapi kendala teknis dan kelembagaan dalam menyusun Renstra yang berkualitas dan terintegrasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi perangkat daerah di Kabupaten Merauke dalam penyusunan Renstra yang selaras dengan RPJMD 2025–2029 melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR). Pendampingan dilakukan terhadap empat kelompok perangkat daerah yang mewakili fungsi pelayanan dasar, administrasi, teknis, dan pengelolaan wilayah. Metode PAR digunakan untuk membangun keterlibatan aktif perangkat daerah dalam proses identifikasi isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan program prioritas. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif efektif dalam meningkatkan pemahaman teknis dan kesadaran perencanaan berbasis hasil. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan data sektoral, sebagian besar OPD berhasil menyusun dokumen Renstra yang lebih terstruktur dan responsif terhadap RPJMD. Pendekatan ini juga mendorong terbentuknya budaya dialog dan kolaborasi antara akademisi dan birokrasi. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa PAR dapat menjadi model pendampingan yang efektif dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan kapasitas kelembagaan daerah. Rekomendasi diarahkan pada perlunya penguatan kapasitas berkelanjutan, pembentukan tim fasilitator internal, serta peningkatan integrasi antara sistem perencanaan dan penganggaran daerah.

Kata kunci: Instansi Pemerintah Daerah, Penelitian Aksi Partisipatif, RPJMD, Rencana Strategis, Perencanaan Strategis

1. LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis merupakan instrumen vital dalam tata kelola pemerintahan daerah yang berfungsi untuk mengarahkan pembangunan dan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan, program, serta kegiatan yang terukur dan berorientasi pada hasil (Karyono & Sihombing, 2020). Renstra yang disusun dengan baik memungkinkan setiap unit kerja di lingkungan pemerintahan daerah memiliki pedoman yang jelas dalam mencapai target pembangunan. Dokumen Renstra yang berkualitas, daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, serta mendorong pertumbuhan pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan.

Penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami metode perencanaan berbasis kinerja (*performance-based planning*), rendahnya kapabilitas analitis, hingga lemahnya integrasi antara dokumen perencanaan (Renstra) dengan dokumen penganggaran (RKPD dan KUA-PPAS) menjadi persoalan mendasar (Sari & Sumarno, 2021). Dinamika perubahan regulasi perencanaan di tingkat pusat dan tuntutan implementasi manajemen berbasis hasil (*result-based management*) seringkali tidak diimbangi dengan kesiapan institusi di tingkat lokal. Akibatnya, dokumen perencanaan yang dihasilkan cenderung bersifat administratif semata dan tidak mampu menjawab kebutuhan pembangunan secara substantif.

Pendampingan penyusunan Renstra menjadi sangat penting untuk dihadirkan. Pendampingan tidak hanya ditujukan untuk memastikan keterpenuhan aspek teknokratis dalam penyusunan dokumen, tetapi juga menjadi medium untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam berpikir strategis, berbasis data, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan yang terus berubah. Menurut Nurdin (2022), pendampingan yang melibatkan institusi akademik mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta membantu perangkat daerah memahami pendekatan perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*) secara komprehensif.

Kabupaten Merauke, sebagai salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Papua Selatan, memiliki tantangan dan peluang tersendiri dalam perencanaan pembangunan. Karakteristik geografis yang luas dan kompleks, kesenjangan pembangunan antar wilayah,

serta tantangan dalam aspek pelayanan dasar menjadikan perencanaan strategis yang adaptif dan kontekstual sebagai sebuah kebutuhan mendesak (Mawikere & Bakarbesy, 2021). Dalam upaya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029, Kabupaten Merauke telah menginisiasi berbagai forum konsultasi public, agar RPJMD dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan sinkronisasi yang kuat dengan Renstra perangkat daerah sebagai pelaksana teknis pembangunan.

Permasalahan sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra menjadi salah satu titik lemah dalam tata kelola pembangunan daerah. Temuan Juniawati et al. (2023), banyak perangkat daerah belum memiliki pemahaman menyeluruh mengenai proses penjabaran visi-misi kepala daerah ke dalam program sektoral yang terukur. Keselarasan antara dokumen induk (RPJMD) dan dokumen turunan (Renstra) adalah kunci untuk menjamin konsistensi arah pembangunan dan efisiensi alokasi anggaran. Sinkronisasi yang memadai, dapat meminimalisir risiko terjadinya tumpang tindih program, pemborosan anggaran, serta ketidaktepatan sasaran kebijakan publik.

Pendampingan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tidak hanya menjadi kebutuhan teknokratis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab akademisi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Institusi pendidikan tinggi dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Pendekatan partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, akademisi, dan masyarakat sipil, akan mendorong terbentuknya perencanaan yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel (Rahman & Mustofa, 2022).

Dalam jangka panjang, sinergi antara akademisi dan pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen Renstra dapat memperkuat penerapan prinsip-prinsip good governance. Kegiatan pendampingan bukan hanya sebatas transfer pengetahuan teknis, tetapi juga merupakan ruang pembelajaran kolektif untuk meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan. Peningkatan kapasitas teknis perencana di tingkat lokal dapat menjadi fondasi penting dalam menciptakan budaya kerja yang berbasis data, hasil, dan evaluasi kinerja, yang akan sangat bermanfaat bagi siklus perencanaan tahunan berikutnya (Sakty et al., 2023).

Kabupaten Merauke memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi pusat pertumbuhan baru di wilayah Papua Selatan, terutama jika didukung oleh perencanaan yang tepat sasaran dan terstruktur. Dukungan akademisi dalam bentuk pendampingan

penyusunan Renstra yang selaras dengan RPJMD, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang lebih merata. Ini bukan hanya tentang memenuhi kewajiban administratif, melainkan membangun kerangka strategis jangka menengah yang mampu mendorong transformasi daerah secara berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Pengabdian masyarakat yang berfokus pada pendampingan penyusunan Renstra perangkat daerah di Kabupaten Merauke merupakan langkah strategis yang sangat relevan. Selain sebagai bentuk kontribusi akademik, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, dan partisipatif. Melalui penguatan kapasitas perencanaan daerah yang berbasis data dan selaras dengan dokumen RPJMD, diharapkan Kabupaten Merauke dapat menjadi model percontohan perencanaan yang integratif dan berbasis pada kebutuhan riil meningkatkan kapasitas perangkat daerah Kabupaten Merauke dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Merauke Tahun 2025–2029 melalui strategi pendampingan yang partisipatif dan aplikatif. masyarakat.

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan kapasitas perangkat daerah Kabupaten Merauke dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Merauke Tahun 2025–2029 melalui strategi pendampingan yang partisipatif dan aplikatif. Tujuan ini untuk menjawab permasalahan bagaimana strategi pendampingan dapat meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Merauke Tahun 2025–2029.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan Participatory Action Research (PAR) menjadi landasan metodologis utama dalam kegiatan pendampingan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Kabupaten Merauke. PAR merupakan model intervensi sosial yang menggabungkan riset dengan tindakan nyata melalui partisipasi aktif dari aktor lokal dalam proses identifikasi masalah, perumusan solusi, pelaksanaan, hingga evaluasi bersama. Penguatan kapasitas perencanaan daerah, PAR tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan output berupa dokumen perencanaan, tetapi juga membangun kesadaran kritis (critical consciousness) dan kemandirian institusional di kalangan perangkat daerah. Metode ini berangkat dari asumsi bahwa para pelaku lokal (dalam hal ini aparatur perencana Perangkat

Daerah) memiliki pengetahuan dan pengalaman yang valid, dan karena itu perlu dilibatkan secara penuh dalam setiap tahapan proses perencanaan (Kemmis et al., 2014). Proses penyusunan Renstra menjadi bukan sekadar tugas administratif, tetapi forum pembelajaran kolektif yang mendorong penguatan tata kelola berbasis data dan refleksi.

Kelebihan utama dari pendekatan PAR adalah kemampuannya membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap hasil kegiatan, serta mendorong kolaborasi lintas aktor yang lebih harmonis. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa PAR efektif dalam meningkatkan kapasitas perencanaan daerah, khususnya dalam aspek pengambilan keputusan berbasis partisipasi dan pengetahuan lokal (Akhmadi, 2022; Juniawati et al., 2023). Penggunaan PAR akan memperkuat integrasi antara dokumen teknokratis dengan realitas sosial di lapangan, karena perangkat daerah tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam merumuskan arah pembangunan sektoral. Metode ini sangat relevan untuk wilayah seperti Merauke yang memiliki dinamika sosial, geografis, dan administratif yang kompleks. Pendampingan melalui PAR memberikan ruang dialog yang setara antara fasilitator (akademisi) dan perangkat daerah, sehingga proses perencanaan tidak bersifat top-down, melainkan berkembang melalui interaksi, pertukaran pengetahuan, dan evaluasi kritis bersama.

Pendekatan PAR juga memiliki sejumlah kelemahan dan tantangan yang perlu dikelola secara hati-hati. Salah satu kelemahan utama adalah bahwa metode ini memerlukan waktu yang relatif lama, karena prosesnya mengutamakan konsensus dan iterasi berulang melalui refleksi bersama. Hal ini bisa menjadi kendala ketika menghadapi keterbatasan waktu, anggaran, atau komitmen dari peserta. Keberhasilan PAR sangat bergantung pada kualitas fasilitasi dan kemampuan membangun hubungan horizontal antara semua pihak yang terlibat. Jika tidak dikelola dengan baik, proses partisipatif justru bisa menjadi simbolik atau sekadar formalitas, tanpa menghasilkan perubahan substantif dalam praktik perencanaan. Penting bagi pelaksana PAR untuk memiliki kompetensi dalam memediasi konflik kepentingan, menjaga dinamika kelompok, serta mendokumentasikan proses secara sistematis (Bryson, 2018). Meskipun memiliki keterbatasan, PAR tetap merupakan pendekatan yang sangat kuat dalam konteks pengembangan kapasitas dan transformasi kelembagaan, terutama jika dipadukan dengan strategi fasilitasi yang adaptif dan responsif terhadap konteks lokal.

Tahap pertama yang dilakukan adalah identifikasi kebutuhan dan pemetaan masalah, yang dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan perencana perangkat daerah serta wawancara semi-terstruktur dengan pejabat Baperinda. Tujuannya adalah

memahami secara mendalam tantangan dan celah dalam proses penyusunan Renstra sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan keterpaduan terhadap RPJMD. Menurut Hasibuan dan Surbakti (2021), tahapan diagnosis partisipatif merupakan dasar penting dalam membangun kepercayaan dan validitas intervensi.

Selanjutnya dilakukan perencanaan tindakan bersama, yang difasilitasi melalui lokakarya teknis. Dalam tahap ini, perangkat daerah bersama tim pengabdian menyusun kerangka kerja logis, menganalisis kesesuaian indikator, serta memetakan tujuan dan sasaran yang mendukung RPJMD 2025–2029. Pendekatan ini mendorong transformasi perencanaan dari pendekatan normatif menjadi berbasis kinerja dan hasil (result-based planning) (Juniawati et al., 2023). Dalam forum ini, peserta didorong untuk saling bertukar pengalaman dan mengidentifikasi praktik baik yang bisa direplikasi.



Gambar 1. Kegiatan Perencanaan Tindakan Bersama

Tahap keempat adalah pendampingan teknis individual, yaitu proses asistensi langsung dalam penyusunan dokumen Renstra masing-masing OPD. Kegiatan ini mencakup rewiu narasi, struktur dokumen, logika intervensi program, dan formulasi indikator kinerja utama (IKU) serta indikator kinerja program (IKP). Studi dari Sari & Sumarno (2021) menunjukkan bahwa proses fasilitasi langsung secara individual mampu meningkatkan akurasi dan keselarasan antara dokumen perencanaan sektoral dan dokumen induk pembangunan daerah.



Gambar 2. Kegiatan Pendampingan Teknis Individual



Gambar 3. Kegiatan Pendampingan Teknis Individual

Setelah draft disusun, dilakukan review dan validasi dokumen melalui kegiatan uji publik yang menghadirkan pihak Bappeda, perencana OPD, serta mitra akademik. Tujuan dari proses ini adalah memastikan bahwa Renstra yang disusun tidak hanya administratif, tetapi juga strategis dan akuntabel. Menurut Nurdin (2022), pelibatan multipihak dalam evaluasi dokumen dapat meningkatkan kualitas dan legitimasi perencanaan.

Tahapan berikutnya adalah refleksi partisipatif, di mana seluruh peserta melakukan evaluasi proses dan hasil kegiatan. Refleksi ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, serta pelajaran penting yang diperoleh selama kegiatan berlangsung. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip continuous improvement dalam manajemen publik (Bryson, 2018), serta mendorong penguatan tata kelola yang lebih adaptif. Metode pendampingan partisipatif ini bertujuan tidak hanya menyusun dokumen Renstra yang selaras dengan RPJMD, tetapi juga membangun kultur perencanaan yang kolaboratif dan berbasis data. Melalui pembelajaran kolektif dan fasilitasi aktif, diharapkan perangkat daerah Kabupaten Merauke mampu menghasilkan perencanaan strategis yang lebih efektif, terukur, dan inklusif (Sakty et al., 2023). Jumlah perangkat daerah yang didampingi sebagai berikut :

Tabel 1. Kelompok Perangkat Daerah yang Didampingi

Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Kesehatan dan RSUD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Satpol PP dan Damkar	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

BPBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Dinas Sosial	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Perikanan	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pendapatan Daerah
Inspektorat	Sekretariat Daerah		Badan Pengelola Perbatasan Daerah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Kabupaten Merauke telah dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif berbasis Participatory Action Research (PAR). Perangkat daerah dibagi menjadi empat kelompok besar berdasarkan kesamaan fungsi layanan dan struktur kelembagaan. Masing-masing kelompok mendapatkan asistensi teknis dalam bentuk lokakarya, diskusi terfokus, dan review dokumen untuk memastikan kesesuaian antara Renstra dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merauke Tahun 2025–2029. Proses ini tidak hanya bertujuan menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih berkualitas, tetapi juga meningkatkan kapasitas internal perangkat daerah dalam menerapkan prinsip perencanaan berbasis kinerja dan hasil (*result-based planning*).

Kelompok 1, yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satpol PP dan Damkar, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Inspektorat, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam kemampuan merumuskan indikator kinerja utama (IKU) dan program strategis. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mampu menyusun narasi Renstra yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Tantangan masih ditemukan pada instansi seperti Satpol PP dan Damkar, yang mengalami kesulitan dalam merumuskan program berbasis kebutuhan masyarakat dan data yang terukur. Minimnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang perencanaan juga menjadi catatan penting dalam proses pendampingan kelompok ini.

Kelompok 2, yang mencakup Dinas Kesehatan dan RSUD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bappeda, serta Sekretariat Daerah, menunjukkan performa cukup baik dalam menyusun Renstra yang terstruktur. Dinas Kesehatan dan RSUD, misalnya, menonjol dalam menyelaraskan program dengan sasaran RPJMD yang berfokus pada penurunan angka stunting dan peningkatan pelayanan kesehatan primer. Beberapa perangkat daerah, seperti Dinas Kominfo dan Disnakertrans, mulai menerapkan pendekatan evidence-based dalam menentukan prioritas kegiatan. Meski demikian, ditemukan tantangan dalam menyusun indikator kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), sehingga perlu dilakukan penguatan teknis lanjutan dalam penyusunan logika intervensi.

Pendampingan terhadap Kelompok 3, yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, berfokus pada peningkatan ketepatan perumusan isu strategis sektoral dan keterkaitannya dengan RPJMD. Dinas PUPR menunjukkan kemajuan dalam penjabaran arah kebijakan pembangunan infrastruktur wilayah, dengan indikator berbasis capaian pembangunan jalan, irigasi, dan sanitasi. Tantangan utama yang diidentifikasi adalah penyusunan indikator program yang konsisten dengan dokumen penganggaran, serta perlunya peningkatan kualitas data sektoral untuk mendukung proses perencanaan.

Kelompok 4, yang terdiri dari Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (gabungan dua kelompok), Sekretariat DPRD, Badan

Pendapatan Daerah, dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah, masih menghadapi kendala serius terkait keterbatasan teknis dalam penyusunan dokumen. Dalam pendampingan ini, pendekatan partisipatif berhasil membangun pemahaman bahwa penyusunan Renstra bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan alat strategis untuk mencapai visi pembangunan daerah. Sebagai contoh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung berhasil menyusun program pemberdayaan berbasis potensi lokal, dengan strategi yang mempertimbangkan karakteristik sosial-budaya masyarakat kampung.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang digunakan dalam proses pendampingan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas dokumen Renstra perangkat daerah. Pendekatan ini mendorong kolaborasi antarinstansi, pertukaran pengetahuan, serta pembelajaran lintas sektor yang memperkaya proses perencanaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Juniawati et al. (2023) dan Sakty et al. (2023), yang menegaskan bahwa pelibatan aktif perangkat daerah dalam siklus perencanaan strategis mendorong keselarasan program pembangunan dan memperkuat akuntabilitas kelembagaan. Hasil kegiatan ini dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel 2. Hasil Pendampingan Tiap Kelompok

Kelompok	Kelebihan	Kelemahan
Kelompok 1	Meningkatnya pemahaman teknis penyusunan indikator dan logika perencanaan	Keterbatasan SDM perencana di OPD teknis
	Beberapa OPD seperti Dinas Pendidikan berhasil menyelaraskan Renstra dengan RPJMD secara baik	Data sektoral kurang lengkap untuk mendukung penyusunan indicator
Kelompok 2	Mampu menyusun indikator kinerja yang cukup spesifik dan terukur	Koordinasi lintas bidang belum optimal
	Penerapan evidence-based planning mulai berjalan	Kerangka logis dokumen belum konsisten di semua OPD
Kelompok 3	Mampu merumuskan isu strategis sektoral dan mengintegrasikan program prioritas	Indikator kinerja belum konsisten antar level (tujuan–sasaran–program)
	Beberapa OPD telah mencoba menyinkronkan perencanaan dan penganggaran	Masih ada kebingungan dalam penggunaan istilah teknis perencanaan
Kelompok 4	Mulai memahami pentingnya perencanaan strategis berbasis RPJMD	Teknik penyusunan dokumen masih administratif dan belum reflektif
	OPD seperti DPMK berhasil menyusun program berbasis potensi local	Rendahnya pengalaman dalam penyusunan logika intervensi strategis

Pendekatan Participatory Action Research (PAR) telah terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas perencanaan strategis perangkat daerah Kabupaten Merauke. Melalui keterlibatan aktif para aparatur dalam setiap tahapan penyusunan Renstra, terjadi peningkatan pemahaman terhadap pentingnya integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Hal ini sejalan dengan temuan Israel et al. (2010) yang menyatakan bahwa PAR mampu membangun kapasitas komunitas dalam advokasi kebijakan melalui partisipasi yang setara antara akademisi dan praktisi. Dalam konteks ini, pendampingan tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih berkualitas, tetapi juga memperkuat komitmen perangkat daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa Kelompok 1, yang terdiri dari OPD seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Inspektorat, mampu menyusun Renstra yang lebih terstruktur dan selaras dengan RPJMD. Peningkatan ini didorong oleh pemahaman yang lebih baik terhadap pentingnya indikator kinerja utama (IKU) dan logika intervensi program. Namun, tantangan masih ditemukan dalam hal keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perencanaan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, sebagaimana disarankan oleh Huffman (2018) bahwa PAR efektif dalam membangun koalisi dan hubungan yang mendukung perubahan sosial.

Pada Kelompok 2, yang melibatkan OPD seperti Dinas Kesehatan dan RSUD, terdapat kemajuan dalam penyusunan indikator kinerja yang lebih spesifik dan terukur. Pendekatan berbasis data mulai diterapkan dalam perencanaan program, mencerminkan adopsi prinsip evidence-based planning. Namun, koordinasi lintas bidang masih menjadi kendala, terutama dalam menyusun kerangka logis yang konsisten di seluruh OPD. Temuan ini sejalan dengan studi oleh Mallakin et al. (2023) yang menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam mengidentifikasi kebutuhan penguatan kapasitas di tingkat local.

Kelompok 3, yang mencakup OPD seperti Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup, menunjukkan kemampuan dalam merumuskan isu strategis sektoral dan mengintegrasikan program prioritas. Beberapa OPD telah mencoba menyinkronkan perencanaan dan penganggaran, namun masih terdapat tantangan dalam penyusunan indikator kinerja yang konsisten antar level tujuan, sasaran, dan program. Hal ini menyoroti perlunya penguatan metodologi dalam penentuan sasaran jangka menengah, sebagaimana diungkapkan oleh Israel et al. (2010) bahwa CBPR dapat meningkatkan kapasitas

komunitas dalam advokasi kebijakan melalui partisipasi yang setara.

Sementara itu, Kelompok 4, yang terdiri dari OPD seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, masih menghadapi kendala dalam teknik penyusunan dokumen Renstra. Namun, pendekatan partisipatif berhasil membangun pemahaman bahwa penyusunan Renstra bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan alat strategis untuk mencapai visi pembangunan daerah. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip PAR yang menekankan pada keterlibatan aktif dan refleksi bersama dalam proses perencanaan.

Secara keseluruhan, penerapan PAR dalam pendampingan penyusunan Renstra perangkat daerah Kabupaten Merauke telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan memperkuat kapasitas kelembagaan. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, dan konsistensi indikator kinerja masih perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dan adaptif terhadap konteks lokal, sebagaimana disarankan oleh Huffman (2018) bahwa PAR efektif dalam membangun koalisi dan hubungan yang mendukung perubahan sosial.

Kolaborasi antara akademisi dan praktisi menjadi krusial untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan dan praktik di lapangan. Pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam pendampingan ini dapat menjadi model bagi daerah lain dalam meningkatkan kapasitas perencanaan strategis perangkat daerah. Dengan demikian, PAR tidak hanya berfungsi sebagai metode penelitian, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan dan transformasi sosial yang efektif dalam konteks pemerintahan daerah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pendampingan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Kabupaten Merauke dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) membuktikan bahwa proses perencanaan strategis yang partisipatif mampu meningkatkan kualitas dokumen dan kapasitas SDM perencana. Pendekatan ini tidak hanya mengedepankan asistensi teknis semata, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif dan reflektif dari setiap perangkat daerah dalam merumuskan arah kebijakan sektoral yang terukur dan selaras dengan dokumen induk, yaitu RPJMD 2025–2029. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perangkat daerah, khususnya dari kelompok-kelompok yang memiliki fungsi pelayanan publik langsung, mengalami peningkatan pemahaman dalam penyusunan indikator kinerja utama, penjabaran sasaran strategis, dan penyusunan logika intervensi

pembangunan. Proses pendampingan juga mengungkapkan bahwa pendekatan PAR menciptakan ruang dialog antara akademisi dan praktisi pemerintah daerah yang dapat memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan inklusif.

Pelaksanaan pendampingan juga menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Beberapa perangkat daerah masih memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan data sektoral sebagai dasar perencanaan, serta belum sepenuhnya menguasai teknik penyusunan indikator yang SMART. Selain itu, koordinasi lintas sektor dalam penyelarasan tujuan dan sasaran antara RPJMD dan Renstra belum optimal di sebagian besar kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi praktik perencanaan strategis tidak cukup dilakukan hanya melalui satu siklus pendampingan, tetapi memerlukan strategi berkelanjutan yang terintegrasi dalam sistem kerja pemerintah daerah. Diperlukan juga mekanisme monitoring dan evaluasi internal yang kuat agar Renstra yang telah disusun tidak hanya berhenti pada dokumen formal, tetapi benar-benar menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan temuan dan dinamika yang terjadi selama kegiatan, direkomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Merauke mengembangkan program penguatan kapasitas secara berkelanjutan bagi perencana di setiap OPD. Program ini dapat berupa pelatihan teknis tahunan, bimbingan penulisan dokumen, serta penguatan penggunaan sistem informasi perencanaan daerah. Selain itu, penting untuk membentuk tim fasilitator internal lintas OPD yang berfungsi sebagai motor penggerak penyelarasan dokumen perencanaan dengan RPJMD secara berkala. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi juga perlu terus ditingkatkan sebagai upaya jangka panjang untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik perencanaan. Dengan demikian, pendekatan partisipatif yang telah berhasil diterapkan dalam kegiatan ini dapat direplikasi dan disesuaikan pada konteks sektor atau wilayah lain, sehingga mendukung terciptanya budaya kerja pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.

DAFTAR REFERENSI

- Akhmadi. (2022). Pendekatan participatory action research dalam penguatan kapasitas pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Publik*, 9(1), 55–64.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>

- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Dwiyanto, A. (2011). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Ebdon, C., & Franklin, A. (2006). Citizen participation in budgeting theory. *Public Administration Review*, 66(3), 437–447.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). *Fourth generation evaluation*. Sage Publications.
- Hasibuan, A., & Surbakti, R. (2021). Partisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 88–96.
- Huffman, S. A. (2018). Participatory action research and community-based participatory research: Tools for building community–academic partnerships. *Health Promotion Practice*, 19(1), 15–19. <https://doi.org/10.1177/1524839917747023>
- Indonesia. (2020). *Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah*. Kementerian Dalam Negeri.
- Israel, B. A., Eng, E., Schulz, A. J., & Parker, E. A. (2010). *Methods in community-based participatory research for health* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Juniawati, A. L., Nugroho, L. E., & Santosa, P. I. (2023). Identification of synchronization of the RPJMD and Smart City Master Plan in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 448, 03020. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344803020>
- Karyono, H., & Sihombing, A. (2020). Perencanaan strategis dalam pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 17(1), 22–31.
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Springer.
- Mallakin, M., Motlagh, M. E., & Haghdoost, A. A. (2023). Participatory strategic planning for local health system strengthening. *BMC Public Health*, 23(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15414-3>
- Mawikere, Y., & Bakarbesy, T. (2021). Tantangan tata kelola pemerintahan daerah di Papua. *Jurnal Otonomi Daerah*, 5(2), 87–95.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nurdin, I. (2022). Evaluasi kualitas dokumen renstra berbasis partisipatif. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 18(2), 40–52.
- Osborne, S. P. (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.
- Rahman, F., & Mustofa, K. (2022). Partisipasi dan good governance dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Transformasi Pemerintahan*, 7(1), 14–25.

- Sakty, I., Haning, M. T., Nara, N., & Syahribulan, S. (2023). Governance of central and regional planning synchronization networks in Indonesia. *Atlantis Highlights in Social Sciences, Education and Humanities*, 14, 85–94. <https://doi.org/10.2991/ahssh.k.230812.013>
- Sari, D., & Sumarno, H. (2021). Integrasi perencanaan dan penganggaran daerah: Studi kasus Renstra OPD. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 25(1), 27–39.
- Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke. (2024). *Dokumen konsultasi publik RPJMD Kabupaten Merauke 2025–2029*. Pemerintah Kabupaten Merauke.
- Smith, B. C. (2007). *Good governance and development*. Palgrave Macmillan.
- Sujarwoto, S. (2017). Evaluasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Bina Praja*, 9(3), 289–302.
- Wibawa, S. (2018). Praktik perencanaan partisipatif dalam pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 6(1), 10–21.